

KEHIDUPAN MASYARAKAT NELAYAN PESISIR UTARA PASURUAN TAHUN 1900-1940**VIRA MARDIATI**

S1 Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email :vira.mardiati@gmail.com

ARTONO

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Tujuan penelitian sejarah ini adalah 1. Pola pemukiman nelayan di Pasuruan untuk menganalisis kehidupan nelayan (kondisi sosial, ekonomi, dan budaya); 2. Untuk menganalisis organisasi nelayan dan usaha perikanan laut Pasuruan; 3. Untuk menganalisis ketimpangan sosial pada masyarakat nelayan Pasuruan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah meliputi proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan fokus 1. Pola pemukiman nelayan serta pola hidup nelayan (kondisi sosial, ekonomi, dan budaya) pada tahun 1900-1940; 2. Organisasi yang di bangun masyarakat nelayan Pasuruan tahun 1900-1940; 3. Ketimpangan yang terjadi pada nelayan Pasuruan tahun 1900-1940. Hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa masyarakat nelayan Pasuruan memiliki pola hunian linier atau memanjang dengan beragam latar belakang penduduknya. Keberagaman masyarakat nelayan pesisir Pasuruan memicu kemunculan kelas sosial. Masuknya penduduk asing juga sangat mendominasi dan menjadikan banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan nelayan Pasuruan. Penggolongan kelas sosial menimbulkan kesenjangan ekonomi dan memicu kemunculan organisasi-organisasi sosial pada nelayan. Struktur organisasi pada nelayan pasuruan tidaklah menguntungkan untuk para nelayan lokal, mereka hanya menjadi nelayan buruh dan nelayan pandega saja, sementara untuk juragan dan para tengkulak di dominasi oleh orang-orang cina atau biasa di sebut pachter. Menurut *Staatsblad* tahun 1849, no. 52 semua orang dapat mengikuti tender lelang, tetapi masuknya para pachter di fasilitasi oleh orang-orang Belanda melalui tender bagi hasil, sehingga hasil yang di peroleh nelayan lokal Pasuruan sangat minim karena beban pajak di beratkan kepada nelayan. Manfaat dari penelitian ini dapat di jadikan kajian oleh kementerian perikanan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan, serta dapat di jadikan pedoman untuk melihat sejarah kemunculan monopoli perdagangan ikan di indonesia.

Kata Kunci : *Nelayan Pasuruan, Pandega, Pachter*

Abstract

The objectives of this historical research ware 1. The pattern of fishermen's settlements in Pasuruan to analyze the fishermen's lives (social, economic, and cultural conditions); 2. To analyze the organization of fishermen and fishery businesses in Pasuruan; 3. To analyze social inequality in the fishing community of Pasuruan. The method used in this research is the historical method which includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography processes with a focus on 1. Fishermen's settlement patterns and fisherman's lifestyle (social, economic, and cultural conditions) in 1900-1940; 2. The organization established by the fishing community of Pasuruan in 1900-1940; 3. Inequality that occurred in Pasuruan fishermen in 1900-1940. The results obtained indicate that the fishing community of Pasuruan has a linear or elongated residential pattern with various population backgrounds. The diversity of the Pasuruan coastal fishing community triggers the emergence of social classes. The influx of foreign residents also dominates and makes many changes in various sectors of Pasuruan fishermen's life. The classification of social class creates economic inequality and triggers the emergence of social organizations for fishermen. The organizational structure of Pasuruan fishermen is not profitable for local fishermen, they only become labor fishermen and pandega fishermen, while skippers and middlemen are dominated by Chinese people or commonly called pachters. According to the *Staatsblad* of 1849, no. 52 Everyone can participate in the auction tender, but the entry of pachters is facilitated by the Dutch through a profit-sharing tender, so that the results obtained by local fishermen in Pasuruan are minimal because the tax burden is burdened on fishermen. The benefits of this research can be used as a study by the Ministry of Fisheries to improve the social and economic conditions of fishing communities, and can be used as a guide to see the history of the emergence of fish trade monopoly in Indonesia.

Keywords: *Pasuruan Fishermen, Pandega, Pachter.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritime mempunyai sumber daya yang melimpah pada sektor atau bidang perikanan dan kelautan. Sektor perikanan dan hasil laut memperoleh tempat ke dua setelah rempah-rempah yang di eksplorasi oleh pemerintah kolonial pada masa penjajahan. Komoditas laut merupakan komponen terpenting, karena mempunyai daya guna yang sangat beragam. Selain ikan yang dipergunakan sebagai lauk-pauk dan ebi yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan terasi yang menjadi ciri khas bumbu nusantara, banyak dari komoditas laut yang bisa dimanfaatkan.

Daya guna ikan yang banyak mempengaruhi usaha penangkapan hasil laut yang meningkat di pantai utara Jawa dan Madura yang dilakukan tidak saja oleh nelayan-nelayan Jawa dan Madura, tetapi juga nelayan di wilayah lain. Meski demikian, kedua wilayah tersebut tampak lebih dominan, menurut data setidaknya sampai pertengahan tahun 1920-an. Nelayan-nelayan Jawa bermukim hampir di seluruh pesisir pantai Jawa. Di wilayah Madura juga demikian. Nelayan-nelayan dari Makasar dan Bugis berperan di Banyuwangi, pantai selatan Besuki, Kepulauan Seribu, Sapudi, dan Kangean. Penangkapan ikan dan hasil laut lainnya di bagian selatan Selat Sunda, pantai selatan Banten, dan daerah Priangan, dilakukan terutama oleh nelayan-nelayan Sunda. Sedangkan di Jakarta dan daerah sebelah barat Karawang, penangkapan ikan dilakukan selain oleh nelayan-nelayan Jawa dan Sunda, juga oleh nelayan-nelayan Melayu.¹

Di beberapa daerah di pantai utara Jawa, usaha penangkapan ikan merupakan mata pencaharian pokok penduduk pantai setempat, sementara sebagian besar lainnya usaha ini hanya sebagai usaha sampingan setelah pertanian. Pasuruan salah satu karesidenan yang memiliki garis pantai yang luas juga ikut menyumbang munculnya masyarakat pesisir nelayan yang besar. Hampir seluruh penduduk pantai pesisir Pasuruan bermata pencaharian sebagai nelayan saat itu.

Pekerjaan sebagai nelayan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain di serahkan kepada tengkulak untuk di jual, sebagian tangkapannya di bawa pulang untuk dijadikan lauk pelengkap menu makanan. Terkadang uang yang mereka peroleh dari juragan atau tengkulak tidak cukup untuk hanya membeli pelengkap lauk lain dan sayur. Mereka menggunakan sisa hasil tangkapan

yang sudah tersortir untuk di olah menjadi lauk menu makan.

Pekerjaan sebagai nelayan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain di serahkan kepada tengkulak untuk di jual, sebagian tangkapannya di bawa pulang untuk dijadikan lauk pelengkap menu makanan. Terkadang uang yang mereka peroleh dari juragan atau tengkulak tidak cukup untuk hanya membeli pelengkap lauk lain dan sayur. Mereka menggunakan sisa hasil tangkapan yang sudah tersortir untuk di olah menjadi lauk menu makan.

Keadaan alamiah Laut Jawa yang airnya relatif tenang dan berpantai landai serta dangkal juga merupakan faktor-faktor yang menguntungkan usaha penangkapan ikan. Pada bulan Januari temperaturnya di bawah 29 derajat, dengan kandungan garam 31,5-35 0/00. Dengan kondisi itu kawasan pantai utara Jawa sudah lama dikenal sebagai wilayah yang kaya ikan, di antaranya di teluk dekat Selat Sunda, sekitar Kepulauan Seribu, sekitar Cirebon, Pemalang, Kendal, Juana, Rembang, Sidayu, Gresik, laut antara pulau Bawean dan pantai utara Madura, sekitar Sapudi, dan Kangean. Setiap tahun ikan layang merupakan jenis ikan yang banyak ditangkap terutama di perairan Madura dan pantai utara Jawa bagian timur (Rinkes: 1925).²

Berawal pada abad ke-7 dan ke-8 perdagangan telah menjadi ciri dari beberapa wilayah seperti di Selat Malaka dan Laut Jawa. Perkembangan ekonomi dan formasi negara bahkan sangat terkait dengan aktivitas perdagangan hasil laut. Hal tersebut juga tergambar dari hikayat yang berkembang yang menunjukkan hubungan dialektis antara penguasa dan pedagang.

Periode 1450-1680 menjadi periode emas ekonomi pesisir, atau Reid menyebut "age of commerce". Puncak keemasan ekonomi nusantara merupakan hasil dari spesialisasi ekonomi yang tinggi (misalnya produk pangan untuk pasar domestik dan beberapa hasil pertanian, hutan dan hasil laut, serta emas untuk pasar global), jaringan perdagangan yang luas, merebaknya monetisasi dan urbanisasi.

Awal tahun 1800 an hingga 1900 an terjadi tarik-menarik politik pesisir dan pedalaman yang menandai maju-mundurnya peran ekonomi wilayah. Di Jawa misalnya, Houben membagi menjadi tiga periode yaitu 1) 1600-1755 dimana terjadi perubahan orientasi politik dari pesisir ke pedalaman atau dari perdagangan ke pertanian yang ditandai naik-

¹ "Visscherij op Java en Madoera", Het Nederlandsche Zeewezen, 1911, hlm. 51," dalam: Masyhuri, *Menyisir Pantai Utara*, 1995, hlm. 22.

² Sutejo K. Widodo. *Dinamika Kebijakan Tentang Perikanan dan Transformasi Budaya Nelayan Pantai Utara Jawa*. (2011).Jurnal Sabda. Edisi April 2011. Vol 6. No. 1

turunnya kekuasaan Mataram; 2) periode 1755-1830 Jawa terpecah belah dan berakhir dengan perang. Belanda memanfaatkan momen ini melalui serial kerjasama pengembangan pertanian tanaman ekspor dengan para penguasa Jawa, sehingga tahun 1757 Belanda telah menguasai daerah pedalaman. 3) 1830-1870 merupakan periode menguatnya kolonialisme. Periode ini ditandai dengan diberlakukannya tanam paksa pada tahun 1830.

Sejak akhir 1800an perikanan telah berorientasi pada pasar yang ditandai dengan pertumbuhan spektakuler usaha pengolahan dan pemasaran ikan. Awal abad ke-20 Kota Bagan Si Api Api di Sumatera Utara telah menjadi salah satu pelabuhan perikanan terpenting di dunia dengan kegiatan utama ekspor perikanan. Pulau Jawa dengan populasi 1/4 dari total penduduk Asia Tenggara pada tahun 1850 telah menjadi pasar terpenting produk perikanan khususnya ikan kering (asin) dan terasi. Kita merujuk pada data Van Der Eng, kontribusi perikanan terhadap total PDB pada tahun 1880 dan 1890 mencapai di atas 2% atau tertinggi yang pernah dicapai perikanan dari seluruh periode antara 1880-2002.³

Tidak stabilan perdagangan perikanan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, permasalahan ketersediaan sumberdaya, ekologi, ekonomi dan sosial. Kebijakan program monopoli garam oleh pemerintah dengan meningkatkan biaya sewa dari f6.000 pada tahun 1904 menjadi f32,000 di tahun 1910 menghasilkan stagnasi dan penurunan peran industri perikanan yang ditunjukkan oleh penurunan ekspor dari 25.900 ton ikan kering di tahun 1904 menjadi 20.000 ton di tahun 1910. Tahun 1912 perikanan Bagan Si Api-Api telah mengalami kemunduran berarti.⁴ Hal yang serupa terhadap permasalahan pajak dan kredit juga terjadi di Jawa dan Madura. Permasalahan ekologi seperti ekstraksi bakau dan pendangkalan perairan, serta menurunnya sumberdaya ikan muncul dan mendorong perikanan bergerak lebih jauh dari pantai.

Pertumbuhan pada sektor industri perikanan periode 1870an sampai 1930an oleh Butcher disebut sebagai penangkapan ikan sektor pantai lebih banyak dengan teknologi yang sama. Periode ini diikuti oleh perubahan teknologi dan perluasan daerah tangkapan ikan sebagai akibat modernisasi nelayan serta industry perikanan dan semakin langkanya ikan di daerah pinggiran pantai (1890an-1930an). Peran

nelayan Jepang dalam hal ini patut dicatat karena mereka masuk ke Indonesia dengan sebagian berprofesi sebagai nelayan. Butcher menilai nelayan-nelayan ini datang dengan dukungan subsidi pemerintahan Meiji yang sedang giat menggalakan industrialisasi. Teknologi perikanan yang lebih maju membuat nelayan Jepang mendapat keuntungan yang lebih besar dari eksploitasi sumberdaya ikan di Indonesia.⁵

Potensi kekayaan laut yang sangat besar dan didukung pula oleh kesuburan daratan Jawa serta jumlah penduduk yang padat ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk yang relative cepat telah menempatkan pulau Jawa, khususnya kawasan pantura memiliki peran yang besar dalam sejarah Jawa khususnya dan sejarah Indonesia bahkan Asia Tenggara pada umumnya. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa kolonialis, kawasan pantai utara Jawa memegang peran yang sangat signifikan dalam dinamika kebaharian di Nusantara.⁶

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas, maka dapat di simpulkan rumusan masalah yang hendak penulis capai adalah :

1. Bagaimana pola pemukiman nelayan di Pasuruan pada tahun 1900 hingga tahun 1940
2. Bagaimana status ekonomi masyarakat nelayan dapat mempengaruhi kemunculan kelas sosial
3. Mengapa masyarakat nelayan Pasuruan ber pendapatan rendah meski hasil tangkapan mereka berharga tinggi
4. Bagaimana struktur organisasi nelayan di Pasuruan serta bagaimana struktur kelas sosial yang terbentuk

Tinjauan Pustaka adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (review of literature) yang berfungsi di antaranya untuk mengetahui manfaat penelitian sebelumnya, menghindari duplikasi dan memberikan masalah penelitian. Sepengetahuan penulis, pembahasan tentang pola kehidupan nelayan pesisir pulau jawa sudah ada yang membahas, tetapi pembahasan yang spesifik dan kronologis belum ada. Penelitian ini merupakan pelengkap dari karya-karya yang sudah ada yang membahas tentang pola kehidupan nelayan dan kemaritiman karesidenan Pasuruan. Ada beberapa karya yang dapat dijadikan sumber dalam penelitian ini, antara lain:

Pertama, buku karya Masyhuri yang berjudul Menyisir Pantai Utara yang diterbitkan oleh Yayasan

³<https://ikanmania.wordpress.com/2007/12/28/menelusuri-pola-pertumbuhan-industri-perikanan-laut-indonesia-beberapa-catatan/> (Suandi, Menelusuri Pola Pertumbuhan Industri Perikanan Laut Indonesia, Inovasi, vol6/XVIII/Maret 2006; <http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=133#top>)

⁴Butcher, J.G. The Salt Farm and the Fishing Industry of Bagan Si Api-Api, 62 (October 1996): hlm 91-122.

⁵ Singgih Tri Sulistiyono. *Mengenal Sistem Pengetahuan, Teknologi, dan Ekonomi Nelayan Pantai Utara Jawa*. Jurnal Agastya. (2014). Edisi Juli 2014. Vol 04. No. 02

⁶ *ibid*

Pustaka Nusantara di Jakarta pada tahun Maret 1996. Buku ini mengulas tentang system sosial dan ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat nelayan atau rakyat pesisir pulau Jawa dan Sumatra, selain buku karya masyhuri ada juga buku tentang perekonomian nelayan karya Ian Smith, dan juga buku pendamping yang lain.

Kedua, data statistic dan foto pantai Pasuruan yang ada di badan arsip nasional dan arsip kota Pasuruan. Berupa catatan atau Salinan data statistic hasil perolehan laut nelayan yang di bongkar muat di pesisir pulau Jawa dan juga foto pantai Pasuruan.

Metode Penelitian

Setiap disiplin ilmu pastilah mempunyai metodologi penelitian yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁷ Untuk melakukan penelitian mengenai sejarah yang sudah terjadi pada masa lampau itu memerlukan metode guna untuk mempermudah dalam melakukan penelitian sejarah yang dilakukan. Dalam penelitian sejarah terdapat 4 tahapan yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

Heuristik (Pengumpulan Sumber). Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Langkah pertama dalam metode penelitian sejarah ini yaitu penulis mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan catatan perekonomian dan perolehan nelayan pesisir pantai utara Jawa baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer didapatkan dari hasil melihat catatan statistic yang telah di simpan di badan arsip nasional berupa catatan *Abarktprijzen der ondervalojende artikelen* berupa catatan perolehan hasil tangkapan ikan per tahunnya. Kemudian sumber sekunder didapatkan dari Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Surabaya berupa buku dunia maritim pantai barat sumatera dan negara maritim nusantara, sebagai pembanding dalam penulisan. Perpustakaan UMM fakultas pertanian peternakan penulis mendapatkan referensi buku ekonomi perikanan karya obor, dan Perpustakaan Fakultas pertanian UGM penulis mendapatkan referensi buku utama yaitu buku karya masyhuri yang berjudul *Mentisir pantai utara*, di dalamnya banyak mengutip data-data statistik dari berbagai daerah yang berhubungan dengan nelayan. Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur yang berupa buku-buku referensi lain, koran dan sumber pendukung lainnya yang dianggap relevan guna untuk menambah wawasan dan digunakan sebagai rujukan dalam menjawab rumusan masalah yang

telah dibuat penulis. Selain itu juga hasil dokumentasi yang berupa foto-foto juga sangat diperlukan sebagai kelengkapan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Kritik sumber merupakan tahap kedua setelah dilakukannya pengumpulan sumber. Kritik sumber ini bertujuan untuk menyeleksi data-data menjadi fakta.⁸ Dalam tahap ini, peneliti menggunakan kritik internal yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber data berupa data sumber primer dan sumber sekunder. Komparasi data primer dan data sekunder dengan cara membandingkan catatan statistik yang di peroleh dari badan arsip nasional yang ber bentuk tulisan belanda dengan buku karya masyhuri yang telah di tulis menggunakan bahasa indonesia yang lebih dimengerti penulis.

Langkah selanjutnya setelah melakukan kritik adalah interpretasi sumber. Interpretasi ini merupakan penafsiran terhadap suatu fakta.⁹ Pada tahap interpretasi sumber ini, penulis melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang telah didapatkan dari sumber-sumber sekunder yang di buktikan kebenarannya dengan data sumber sekunder, kemudian selanjutnya penulis melakukan analisis untuk mendapatkan keterkaitan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya.

Historiografi, tahap ini merupakan tahap akhir dari suatu metode penelitian sejarah. Dalam tahap ini kemudian penulis selanjutnya akan melakukan penulisan sejarah yang berpedoman pada fakta-fakta yang diperoleh saat dilakukannya penelitian. Rangkaian fakta yang telah ditafsirkan kemudian akan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau sebagai cerita sejarah.¹⁰ Dari berbagai hasil sumber-sumber yang telah didapatkan dan diolah menjadi fakta sejarah maka kemudian dituangkan secara kronologis secara runtut dan beraturan dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Geografis Pasuruan dan Pola Pemukiman

1. Letak geografis dan astronomis

Karesidenan Pasuruan terletak disebelah timur dari Surabaya dan di sebelah barat dari karesidenan Besuki. Pasuruan teletak pada 112°33'55"-113°05'37" BT 7°32'34"- 7°57'20" LS yang terbentang dari gempol hingga kraksaan. Sedangkan batasan utara perairan meliputi wilayah gempol, pasuruan, grati, tongas, sumberkaren, dringoe, dan ber

⁸Aminudin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: UNESA Press, 2005), hlm. 10.

⁹*Ibid.*, hlm. 11.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 11.

⁷Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 39.

akhir di gending. Sedangkan batas selatan meliputi tempeh, pakis, kandang, dan lumajang.

Pasuruan merupakan daratan yang terbagi kedalam tiga zona fisiografi. Dataran tinggi di sebelah selatan, daerah vulkanik di pusat, dan lipatan-dataran rendah- di sebelah utara. Berdasarkan pembagian tiga zona fisiografi karesidenan Besuki, Pasuruan, Surabaya, dan Madura yang memiliki daerah lipatan-dataran rendah- yang luas serta memiliki garis pantai yang luas. Empat karesidenan tersebut di tinjau dari letak wilayahnya merupakan garis luar dari wilayah Jawa Timur. Memiliki garis pantai yang luas dari perairan dalam Hindia-Belanda menjadikan wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah yang strategis. Dapat kita ketahui bahwa laut dalam Hindia-Belanda tidak memiliki arus yang sangat kuat seperti pada laut luar Hindia-Belanda yang notabennya berbatasan langsung dengan samudra Hindia.

Peneliti lebih memilih karesidenan pasuruan sebagai lokasi penelitian. Pasuruan merupakan wilayah penopang Surabaya sebagai pusat pemerintahan di Jawa Timur. Pasuruan memiliki batas wilayah secara astronomis sebagai berikut , sedangkan secara administratif Pasuruan, sebelah barat berbatasan dengan karesidenan Surabaya, sebelah selatan berbatasan langsung dengan samudra hindia, sebelah timur berbatasan langsung dengan karesidenan Besuki, dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan selat Madura.

Kondisi bentang alam Pasuruan sangat beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, lembah, dan juga beberapa danau atau ranu. Keberagaman bentang ala mini yang menjadikan kehidupan sosial di karesidenan Pasuruan sangat beragam. Kehidupan masyarakat pesisir jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Kontur atau bentang alam sangat mempengaruhi pola kehidupan sosial juga. Mempengaruhi jenis pekerjaan, cara bertahan hidup, dan juga pola komunikasi antar masyarakatnya.

2. Pola Pemukiman Pasuruan

Memiliki tiga topografi wilayah, pola pemukiman masyarakat karesidenan Pasuruan juga beragam pada saat itu. Pada tahun 1900-1940 Pasuruan memiliki daya tarik di pusat-pusat pemerintahannya. Memiliki perubahan pemerintahan pada tahun 1930 tidak banyak mengubah sistem atau pola pemukiman pada karesidenan Pasuruan.

Pola pemukiman pertama yaitu pola pemukiman memanjang atau linier. Pola pemukiman ini biasanya terbentuk di sekitar aliran sungai, jalan raya dan di sekitar bibir pantai atau bibir laut. Pola hunian seperti ini banyak ditemukan di daerah Gempol, Bangil, Grati, Tongas, Pasuruan dekat pantai, Gondang, Turen, dan di sepanjang jalan Anyer-Panarukan.

Pola pemukiman yang kedua yaitu pola pemukiman tersebar atau radial. Pola pemukiman ini biasanya terdapat di dataran tinggi atau pegunungan yang ber relief. Pola pemukiman seperti ini banyak di temukan di daerah lumajang, karanglo, penanggungan, kandang, probolinggo, pasuruan tengger.

Pola pemukiman ketiga yakni pola pemukiman terpusat. Pola pemukiman terpusat karena membentuk satu lingkaran pemukiman yang membentuk unit-unit kecil yang memiliki pusat kegiatan. Penempatan lokasi-lokasi sentral juga mempengaruhi pola pemukiman ini, seperti letak alun-alun, pasar, atau tempat per ibadatan. Pola pemukiman seperti ini dapat di temui di pusat karesidenan di Pasuruan dan Malang.

Pada penelitian ini, penulis hanya terfokus pada pola pemukiman linier atau pola hunian memanjang yang terbentang di sepanjang bibir pantai karesidenan Pasuruan. Pola pemukiman linier banyak diterapkan oleh masyarakat nelayan di berbagai daerah khususnya juga di karesidenan Pasuruan. Peneliti hanya memiliki fokus pola pemukiman linier di sebelah utara karesidenan Pasuruan. Khususnya di daerah Gempol, Bangil, Pasuruan, Grati, Tongas.

3. Wilayah Penangkapan Ikan Pesisir Utara Jawa Timur

Berdasarkan topografi wilayah perairan Jawa bagian utara yang ber aruskan tenang menjadikan banyak varietas ikan yang bermigrasi ke wilayah tersebut. Daerah-daerah yang kaya akan ikan di lingkungan perairan pantai utara Jawa antara lain teluk-teluk di Selat Sunda, di sekitar Pulau-pulau di Selat Sunda, perairan pantai Jakarta, Pulau Seribu, Cirebon yang merupakan wilayah dari Jawa Barat. Perairan Pemalang, Pekalongan, Kendal, Juana, Jepara, Rembang di bagian Jawa Tengah. Perairan Sidoarjo, Gresik, laut antara Pulau Bawean dan pantai utara Madura, perairan di kepulauan Madura, di sekitar Pulau Sapudi dan Kangean di bagian Jawa Timur.

Peneliti terfokus pada perairan utara jawa bagian timur, perairan antara pulau jawa dan pulau Madura. Selat yang dinilai tenang ini menjadikan banyak nelayan bermukim disana. Pasuruan menjadi posisi yang strategis dan sangat menguntungkan bagi nelayan maupun kapal-kapal muatan kecil yang ingin merapat di sana.

4. Masyarakat Nelayan Pesisir Utara Jawa Timur

Masyarakat di perkampungan nelayan mayoritas sering di pandang dengan masyarakat yang kumuh dan kurang tersentuh pendidikan. Rata-rata waktu mereka dihabiskan dengan berkerja saja. Semua waktu mereka di sita dengan pekerjaan. Seperti yang digambarkan dalam novel karya Pramoedya Ananta Toer "Gadis Pantai" yang mana novel tersebut

menggambarkan tentang keluarga nelayan, yang mana sang “Gadis” adalah nenek dari penulis novel tersebut. Dikisahkan dalam novel tersebut bahwasannya kehidupan Nelayan yang dipandang kumuh dan kurang tersentuhnya pendidikan baik moral, formal, maupun *manner*.

Masalah perekonomian juga dipandang sangat diskriminatif untuk masyarakat nelayan. Nelayan sama halnya dengan buruh dalam tingkatan penggolongan di daratan. Hanya ada dua penggolongan kelas sosial pada masyarakat nelayan, yaitu pemilik modal dan buruh. Pemilik modal tidaklah harus dari kalangan nelayan, melainkan kebanyakan adalah dari daratan. Berbeda dengan di daratan yang memiliki beberapa lapisan penggolongan kelas sosial. Masyarakat nelayan mempunyai sistem sosial yang sederhana dan juga dalam lingkup yang sempit.

Kemunculan organisasi masyarakat nelayan juga mendorong munculnya kelas-kelas sosial di masyarakat pesisir. Organisasi-organisasi sosial-ekonomi yang terbentuk dilindungi masyarakat nelayan sangat menonjol pesat pada akhir abad ke – 19, dan peranan kelompok pelepas uang di sektor penangkapan ikan makin menonjol, serta peranan mereka semakin kuat dalam dasawarsa pertama abad ke – 20 akibat tidak adanya pilihan lain bagi nelayan yang memerlukan pinjaman modal kecuali berhutang kepada pemilik modal (juragan).

Pola pemukiman yang memanjang mengikuti bibir pantai juga menjadi faktor terpenting dalam terbentuknya konsep sederhana dalam penggolongan kelas sosial. Tidak banyak “orang ber ada” atau pemilik modal dalam masyarakat nelayan juga mempermudah dalam pemetakan kelas sosial yang ada. Pola tersebut juga berpengaruh pada sistem pendidikan dan juga kesehatan, jika di daratan sistem pemukimannya adalah circle atau melingkar, maka sistem pelayanan akan berada di pusat untuk mempermudah penjangkauan. Pola pemukiman yang memanjang sangat susah untuk di lakukan pembagian sistem pelayanan publiknya. Masa pemerintahan colonial, pusat kota rata-rata berada dekat dengan pesisir, akan tetapi tetap saja perkampungan nelayan tetap memiliki kelas sosial yang rendah.

B. Perekonomian Nelayan

Usaha penangkapan ikan merupakan mata pencaharian pokok penduduk pantai di beberapa daerah di Pantai Utara Jawa. Sementara sebagian besar lainnya penangkapan ikan hanya sebagai usaha sampingan setelah pertanian. Penduduk pantai yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan dapat disebutkan antara lain penduduk pantai di daerah Tegal, Brebes, Indramayu, Cirebon, Pasuruan, dan di daerah-daerah pantai Pojok Timur. Di Madura

hampir seluruh penduduk pantai ber mata pencaharian sebagai nelayan.¹¹

Nelayan-nelayan penuh melakukan penangkapan ikan setiap saat sepanjang tahun, siang atau malam bila keadaan laut memungkinkan. Sementara nelayan-nelayan sampingan melakukan penangkapan ikan pada saat-saat tertentu yang senggang, seperti setelah panen bagi nelayan yang bermata pencaharian utamanya sebagai petani. Nelayan penuh terlibat pada usaha penangkapan ikan lepas pantai, sementara nelayan sampingan umumnya terlibat dalam penangkapan ikan dekat pantai. Perbedaan lain yang cukup menyolok adalah nelayan-nelayan penuh menangkap ikan terutama untuk pemenuhan kebutuhan pasar, sementara nelayan sampingan melakukan penangkapan ikan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.

Keuntungan atau pendapatan yang diperoleh nelayan tidak bisa diperbandingkan dengan pendapatan pachtter/penadah. Pendapatan kotor seorang nelayan dalam satu tahun sekitar f 180,-. Jumlah pendapatan ini didasarkan pada perhitungan sebagai berikut ; jumlah pendapatan ikan per tahun di bagi jumlah penduduk dan di kurangi pajak yang dibebankan kepada nelayan. Besaran pajak yang dibebankan kepada nelayan adalah f 1,-, sementara untuk memberi balasan kepada pemilik modal nelayan di kenakan beban biaya sebesar 50% dari pendapatan kotor, $1/6$ hasilnya lagi untuk angsuran perahu. Jadi seorang nelayan mendapatkan penghasilan bersih sebesar f 60,- per tahun atau sebesar f 5,- per bulan. Jumlah pendapatan ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan seorang nelayan menurut perhitungan *Mindere Welvaart Commissie*, yang setiap tahunnya bervariasi antara f 6,60 dan f 7,50 untuk nelayan yang berkerja pada perahu mayang yang di operasikan oleh 20 nelayan dan sebesar f 7,50 untuk nelayan yang berkerja pada perahu mayang yang di operasikan oleh 30 nelayan.

Apabila dibuat rata-rata pendapatan seorang nelayan f 76,80 per tahun, atau f 6,40 per bulan, maka dari itu pendapatan seorang nelayan setiap harinya sekitar 21,30 sen. Jumlah pendapatan nelayan sebesar ini lebih baik dari pada pendapatan petani. Sebagai perbandingan, pendapatan seorang petani per tahun memiliki rata-rata sebesar f 70,- per tahun, atau sebesar f 5,80 per bulannya, perbandingan ini terlihat tipis selisihnya tetapi dapat berdampak besar untuk pemenuhan kehidupan. Belum lagi para nelayan yang dapat memiliki profesi ganda ketika mereka libur untuk melaut.

¹¹ Masyhuri.1996. Menyisir Pantai Utara. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara. Hal 22-23

Pendapatan nelayan akan terlihat sangat kecil apabila di perbandingkan dengan pendapatan seorang buruh di perkebunan. Pada periode yang sama pendapatan rata-rata seorang buruh perkebunan per hari sebesar 25 sen, atau sebesar f 7,50 per bulan. Namun demikian bila diperhitungkan kembali pendapatan bersih nelayan jika tidak di potong untuk membayar perahu sewa sebesar 8,30 sen mencapai sekitar 29,60 sen per harinya, atau lebih besar sekitar 4,60 sen dari seorang buruh perkebunan. Meski demikian pendapatan nelayan masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan pendapatan rata-rata nelayan tambak, yang setiap tahunnya mencapai sekitar f 260,- atau sebesar 72 sen per harinya.

1. Kondisi Permintaan Dan Penawaran Ikan

Pada masa akhir abad ke 19, perekonomian di Jawa dan Madura mengalami kemerosotan yang membawa dampak buruk bagi permintaan di sektor perikanan. Dijelaskan didalam De Kolonial Staat 1854 hingga 1942, krisis ekonomi yang menyerang Hindia Belanda pada kuartal terakhir abad ke-19 menjadikan pemerintah menyadari bahwa liberalisme ekonomi tidak secara otomatis menyebabkan kemakmuran bagi semua orang. Situasi tersebut juga mempengaruhi sektor perikanan di Jawa dan Madura. Buruknya perekonomian masyarakat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke- 20 menjadikan merosotnya daya beli masyarakat, sehingga permintaan akan kebutuhan pangan ikan juga menurun. Kejadian tersebut menjadi berdampak besar terhadap usaha nelayan untuk melakukan penangkapan ikan.

Tetapi pemerintah membuat hipotesa yang berlain arah, pemerintah menganggap bukan kemerosotan perekonomian masyarakat yang menyebabkan kemunduran usaha penangkapan ikan, akan tetapi justru sebaliknya. Kemunduran sektor penangkapan ikan ikut menyebabkan memburuknya perekonomian masyarakat. Hingga pada akhir abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda membentuk sebuah komisi untuk melakukan penelitian. *Mindere Welvaart Commissie* atau komisi kesejahteraan, yang mana untuk mengukur hipotesa seberapa jauh keadaan ekonomi yang buruk ini menyebabkan turunnya konsumsi ikan, dan yang pada gilirannya kemudian menyebabkan menurunnya usaha penangkapan dan produksi ikan.

Untuk menjamin adanya kaitan antara analisis yang diuraikan diatas dengan hubungan nyata dalam industri penangkapan ikan, perlu diperhatikan bahwa kurva penawaran melengkung ke belakang dapat berhadapan dengan kurva permintaan yang relatif tidak elastis. Ini terjadi apabila produk perikanan termasuk golongan “barang mewah” dan tidak mempunyai pengganti yang hampir sama di pasar.

Pada setiap kegiatan perikanan yang mempunyai kelayakan ekonomi, dapat diperkirakan adanya satu titik keseimbangan penawaran dan permintaan. Tapi perikanan yang tidak mempunyai kelayakan ekonomi akan menunjukkan garis permintaan yang mencakup kisaran harga yang sepenuhnya di bawah harga garis penawaran.

C. Kelas Sosial Pesisir

Sektor penangkapan ikan selalu membutuhkan modal yang banyak untuk memenuhi kebutuhan alat tangkap dan juga kebutuhan bahan bakar motor. Mulai terlihat adanya sitem pembagian kelas sosial dalam usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di Pesisir pantai Utara Jawa Timur. Khondk mengajukan tiga dasar pembentukan kelas sosial, yakni pertama, kelas berdasarkan kepemilikan (*ownership*) alat produksi, kedua kelas yang berdasarkan kontrol terhadap alat produksi, dan ketiga kelas berdasarkan kontrol terhadap manusia atau *control over people* (Khon *et al.* 1990:996). Menurut Wright dan Cho membagi kelas atas tiga dimensi, yakni kelas berdasarkan kepemilikan (*property*), berdasarkan otoritas (*authority*), dan berdasarkan keahlian (*expertise*) (Wright and Cho 1992:89). Sementara itu menurut Wright sendiri menguraikan bahwa berdasarkan dimensi kepemilikan alat produksi (*ownership of assets in the means of production*), ada dua kelas sosial utama dalam kapitalisme, yakni buruh dan kapitalis.¹²

Tokoh pemikir lain, yakni Bourdieu membuat kelas sosial berdasarkan “Modal” capital. Capital itu sendiri, menurut dia, terdiri atas empat jenis, yakni economic capital, sosial capital, cultural capital, dan symbolic capital. Berdasarkan capital ini, Bourdieu membagi kelas sosial itu atas tiga, yakni kelas dominan (*dominant class*), kelas menengah (*middle class*), dan kelas bawah (*lower class*). Kelas sosial ini yang hingga sampai saat ini tetap di pergunakan dan tetap lestari di kehidupan masyarakat pesisir utara Jawa, terkhusus untuk pesisir Pasuruan.

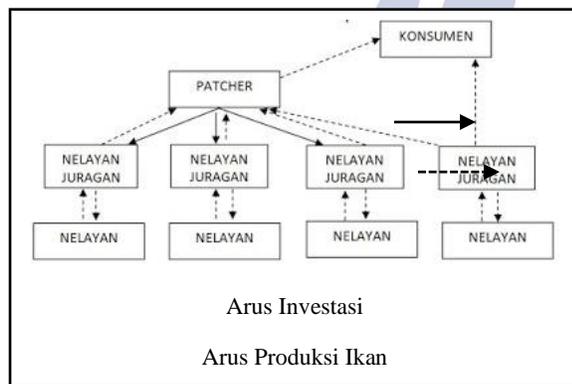
Kemunculan kelas sosial tersebut terjadi karena adanya komersialisasi dari para pemilik modal kepada nelayan biasa. Munculnya beberapa kelas sosial di lingkungan masyarakat nelayan kala itu menjadikan banyaknya kasus ketimpangan sosial. Belum lagi tekanan pajak yang diberikan kepada nelayan yang mengambil ikan di laut yang di berlakukan oleh pemerintah Hinda-Belanda kala itu menjadikan rapatnya kelas sosial pada masyarakat pesisir Pasuruan.

1. Kemunculan Penguasa Kelas Sosial Pesisir

¹² Rilus A. Kinseng. 2014. Konflik Nelayan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 13-17

Pachter di sektor penangkapan ikan laut hampir semuanya terdiri dari orang-orang Cina. Orang-orang Cina tersebut pada umumnya merupakan pedagang kaya yang mempunyai hubungan dengan orang-orang pedalaman. Dengan adanya hubungan dagang dan agen-agen yang dimiliki di daerah pedalaman mempermudah pedagang cina dalam memasarkan ikan-ikan yang terkumpul pada mereka. Terjadi integrasi ekonomi sector penangkapan ikan dengan berbagai usaha sector yang lebih luas. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya pedagang yang semata-mata bersatus sebagai pachter penangkapan ikan, akan tetapi kebanyakan pedagang cina mempunyai peran ganda sebagai pedagang sekaligus pachter di sector penangkapan ikan dan pachter di sector-sector lain.

Diagram Investasi dan Pemasaran Produksi Ikan pada Masa Sistem Sewa



Sumber. Buku *Menyisir pantai utara* karya Masyhuri hal. 94

Pachter di sector penangkapan ikan terlibat dalam penangkapan ikan secara penuh dan lebih lanjut menguasai pembelian ikan di pusat-pusat pendaratan ikan. Pachter menjadi pusat jaringan penangkapan ikan dan sekaligus berperan sebagai penampung hasil tangkapan ikan para nelayan.

Pasuruan menjadi contoh dari percepatan dan mendorong pertumbuhan sector penangkapan ikan. Tingkat pertumbuhan penangkapan ikan dari tahun 1870-an hingga 1900-an cukup memberikan kemakmuran bagi para penangkap ikan atau nelayan. Hal tersebut menjadikan penangkapan ikan menjadi salah satu mata pencaharian dari masyarakat Pasuruan. Sebagian besar memilih menjadi penangkap ikan daripada sector-sector lain. Karena masyarakat memilih untuk menangkap ikan Pasuruan menjadi salah satu pusat penangkapan ikan penting bagi Jawa. Produksi ikan dari pusat-pusat penangkapan ikan yang mampu memenuhi hampir seluruh kebutuhan ikan di Jawa.

Maka dari itu, nelayan di wilayah pasuruan cukup diuntungkan dengan adanya pachter ini.

Peranan pachter ini sangat penting bukan hanya sebagai penarik, pachter ini juga penyedia modal bagi para penangkap ikan. Dengan modal yang berasal dari pachter penangkap ikan dapat menjalankan usahanya dengan baik. Nelayan ikan tidak khawatir terhadap pemasaran ikan dan resiko-resiko yang dihadapi. Pachter berani menanggung resiko jika ada kendala dalam pemasaran atau pada saat kecelakaan atas perahu yang disalurkan kepada nelayan.

2. Organisasi Kecil Penangkapan Ikan

Nelayan Pasuruan merupakan para nelayan yang daerah penangkapan ikannya termasuk kedalam penangkapan ikan dekat pantai. Usaha penangkapan ikan dekat pantai mempunyai system organisasi kerja yang lebih sederhana apabila dibandingkan dengan usaha penangkapan ikan lepas pantai. Organisasi penangkapan ikan yang paling sederhana adalah dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Contoh organisasi penangkapan ikan yang sederhana dan dapat dilakukan oleh satu atau dua orang saja biasanya memilikiciri pengoprasian menggunakan alat tangkap seperti : Wide, serok, jala tangan, anco, seser, dan wuwu.

Organisasi menengah adalah organisasi usaha penangkapan ikan dengan jaring payang pinggir. Organisasi ini tidak jauh berbeda dengan organisasi nelayan lepas pantai yang mana menggunakan system jaring payang tengah. Perbedaan terletak pada jumlah nelayan yang terlibat di dalam proses penangkapan ikan. Penangkapan ikan dengan jaring payang pinggir melibatkan nelayan lebih sedikit dibandingkan dengan penangkapan ikan dengan jaring payang tengah.

Organisasi penangkapan ikan mempunyai sifat yang luwes, dengan adanya kenyataan bahwa para nelayan sering mengoprasikan alat tangkap yang berbeda secara bergantian, sesuai dengan musim atau jenis ikan yang akan ditangkap. Sejumlah nelayan yang tergabung dalam satu kelompok usaha, khususnya nelayan penuh, dapat melakukan penangkapan ikan dengan berbagai jenis jaring yang berbeda.

Hubungan kerja di antara nelayan yang terwujud dalam kelompok-kelompok penangkapan ikan juga bersifat sementara dan setiap saat keanggotaan kelompok dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Ciri umum yang menonjol dari organisasi social usaha penangkapan ikan adalah hubungan ketergantungan yang saling melengkapi di antara nelayan. Berikut ini uraian beberapa organisasi penangkapan ikan yang paling menonjol, meliputi usaha penangkapan ikan lepas pantai maupun dekat pantai. Organisasi ini terbentuk karena penggunaan system alat tangkap yang berbeda seperti ;penangkapan ikan yang menggunakan teknik jaring payang tengah, jaring apung, jaring payang pinggir

dan sero. Tidak ada perbedaan yang menyeluruh dari organisasi-organisasi nelayan tersebut, hanya saja alat tangkap dan penamaan organisasi yang menjadi penanda perbedaan organisasi tersebut.

Organisasi penangkapan ikan dengan teknik jaring payang tengah, jaring apung, dan payang pinggir tidak menuai kecaman dari pihak Hindia-Belanda karena di nilai tidak mengganggu dan hasil tangkapan yang di peroleh juga lumayan banyak. Sementara untuk teknik penangkapan ikan dekat pantai dengan menggunakan alat tangkap sero di larang dan bahkan di kecam oleh pemerintah Hindia-Belanda. Organisasi ini di larang oleh pemerintah Hindia-Belanda karena mengganggu pelayaran. Pemerintah Hindia-Belanda lebih mementingkan keamanan jalur pelayaran kapal-kapal besar pada periode ini, karena semua hasil bumi yang akan di bawa keluar dari Pasuruan mayoritas di angkut oleh kapal dangang, dan sebagian lainnya lewat jalur darat. Meski pada awalnya organisasi sero banyak di minati oleh para nelayan di selat Madura ini, tetapi pada akhir abad ke 19 dengan di keluarkannya larangan penggunaan teknik sero pada teknik penangkapa ikan menjadikan organisasi penangkapan ikan teknik ini sedikit sepi peminat.

Sekali lagi, sebagai suatu kelompok atau organisasi. Para nelayan-nelayan tersebut berkerja di bawah pimpinan seorang kepala yang di sebut juragan laut. Sementara nelayan anggota kelompok kerja disebut sebagai pandega. Terdapat penguasa lagi di atas juragan laut ialah juragan darat. Seorang juragan darat bias berasal dari seseorang yang sebenarnya bukan nelayan, akan tetapi menanamkan modalnya di sektor penangkapan ikan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga berasal dari nelayan murni yang telah memiliki modal besar atau bermodal.

Konsep organisasi ini juga berpengaruh terhadap pembagian hasil dari penangkapan ikan. Hasil yang diperoleh dibagi di antara mereka yang terlibat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan nelayan. Pembagian hasil tidak selalu sama di setiap musimnya, pembagian hasil akan menjadi sangat kompleks apabila musim berubah dan alat yang di gunakan semakin banyak. Pola pembagian yang berubah di pengaruhi oleh kondisi dan tuntutan-tuntutan khusus tertentu yang setiap saat be ubh-ubah. Yang paling jelas seorang juragan akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada seorang pandega. Demikian juga seorang pemilik atau penguasa sarana produksi atau sarana tangkap akan mendapat bagian yang lebih banyak dari yang lainnya.

System bagi hasil di dalam suatu organisasi nelayan tampaknya sesuai dengan tradisi gotong-royong yang hidup dikalangan masyarakat Jawa dan

Madura pada umumnya. Bukan hal yang mengherankan bilamana system pembagian seperti ini hidup terus sampai pada masa-masa sekarang ini sebagaimana tradisi gotong-royong tersebut. Organisasi-organisasi atau kelompok tangkap juga hingga saat ini masih berkembang di lingkungan masyarakat nelayan khususnya Jawa da terkhusus Pasuruan.

Organisasi penangkapan ikan yang rapi dengan ditunjang oleh peralatan yang memadai bisa meningkatkan produktivitas tangkapan, namun hal tersebut tidak serta merta menjamin keteraturan penghasilan yang didapat oleh para nelayan. Pada suatu saat tertentu nelayan berpendapatan cukup besar, namun pada saat-saat yang lain mereka bahkan tidak berpendapatan sama sekali dari laut. Usaha penangkapan ikan bagi para nelayan tetap merupakan seni, seni berburu yang hasilnya bagaikan suatu bonus dalam pencarian. Ketidakteraturan pendapatan nelayan ditentukan oleh banyak factor. Selain factor keberuntungan dalam penangkapan, baik dan buruknya musim tangkap juga sangat besar pengaruhnya terhadap pendapatan nelayan. Ketidak teraturan pendapatan nelayan ini tampaknya juga berpengaruh pada perilaku ekonomi masyarakat nelayan dan pola penanaman modal untuk usaha pengkapan ikan yang mereka lakukan. Pola seperti itu pada gilirannya sagat mempengaruhi pertumbuhan usaha penangkapan ikan pada umumnya.

Perubahan penting sektor usaha penangkapan ikan dalam hal organisasi juga mulai tampak kembali pada awal tahun 1920-an. Ketika organisasi-organisasi social ekonomi bermunculan di kalangan nelayan. Perubahan ini tidak saja menyebabkan bergesernya pola investasi di sektor usaha penangkapan ikan, akan tetapi juga menyebabkan semakin tumbuhnya perdagangan bebas produksi ikan. Kemunculan organisasi social ekonomi ini juga menjadi angin segar para masyarakat nelayan yang selama ini tercengkeram oleh pachter dan pemungutan pajak yang tinggi. Setelah kemunculan organisasi-organisasi social ekonomi yang di prakarsai oleh masyarakat pribumi sendiri inilah muncul pula system koperasi di kalangan masyarakat nelayan. Kemunculan mereka sangat membantu para nelayan dalam mencari modal usaha dan memasarkan hasi tangkapan. Tetapi dalam pejalanannya koperasi-koperasi yang di bangun ini memiliki gesekan dengan para pachter dan semakin surut. Selain itu, kondisi nelayan pasuruan yang tidak sama dengan masyarakat nelayan daerah lain juga sangat berdampak. Pasuruan menjadi daerah penopang Surabaya, yang mana semua hasil bumi yang bernilai tinggi akan di ambil dan di pasarkan ke Surabaya. Pelelangan ikan yang di lakukan oleh koperasi karesidenan Pasuruan juga sangat minim,

mereka lebih memilih untuk menjual hasil tangkapan kepada para tengkulak, dan kemudian tengkulak lah yang membawa ke tempat pelelangan ikan dan pasar ikan yang lebih besar di Surabaya. Minimnya pengarsipan serta pencatatan di Pasuruan juga menjadikan beberapa pencatatan penjualan ikan di karesidenan Pasuruan tidak ter arsipkan beberapa kurun waktu, akan tetapi dari beberapa sumber mengatakan secara tidak langsung bahwa perolehan dan juga penjualan pada sektor perikanan di Pasuruan kemungkinan berjalan stabil dan semakin membaik. Dapat dibuktikan setelah masa kemerdekaan beberapa koperasi nelayan timbul di pesisir Pasuruan dan semakin berkembang pada sekitar tahun 1980 an. Meski terbilang jaraknya agak lumayan lama, tetapi dapat membuktikan bahwa organisasi nelayan di Pasuruan juga mengalami perkembangan meskipun naik turun dan tidak stagnan.

D. Pemerintah Hindia-Belanda Terhadap Masyarakat Nelayan

Pemerintah Hindia-Belanda sejak abad ke 19 telah menerapkan system sewa pada sektor penangkapan ikan di pantai utara Jawa dan Madura. System sewa semacam *revenue farming* pada dasarnya adalah subkontrak atas hak kekuasaan pemerintah kepada pihak swasta atau pengusaha untuk mengumpulkan pendapatan pajak secara periodic. Desentralisasi kesatuan-kesatuan politik yang cukup tajam dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan perolehan dari sektor perpajakan pada masa Hindia-Belanda ini mendorong pemerintah Hindia-Belanda melakukan kerjasama kompromi.¹³ Aliansi dengan pihak kedua terutama golongan Cina yang secara social-ekonomi mempunyai kedudukan yang kuat. Tidak hanya pada sektor penangkapan ikan, system sewa ini juga diterapkan pada sektor-sektor usaha lainnya. Dalam aliansi semacam ini, pemerintah Hindia-Belanda memperoleh uang sewa dalam jumlah tertentu.

Pemerintah Hindia-Belanda selain memberlakukan pajak terhadap usaha-usaha masyarakat, mereka juga menarik pajak untuk daerah-daerah tertentu. Selain memberlakukan dan menarik pajak, pemerintah Hindia-Belanda juga memiliki kewenangan membentuk agen-agen pengawas dan pasukan-pasukan bayaran yang memiliki tugas untuk menekan dan mengawasi gerak-gerik masyarakat kala itu. Tanpa pasukan-pasukan ini masyarakat dinilai akan melakukan banyak kecurangan seperti perlawanan, penyelundupan, dan hal semacamnya yang akan sulit untuk mereka atasi sendiri.

System penyewaan penarikan pajak atas sektor-sektor tertentu oleh pemerintah Hindia-Belanda pernah mengalami puncak perkembangan pada akhir abad ke-19. Dalam perempat terakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 pemerintah-pemerintah kolonial lebih terorganisasi. Pengetahuan mereka terhadap daerah jajahan semakin mendalam. Dalam kasus seperti ini menjadikan kontrol birokrasi terhadap perpajakan menjadi salah satu prioritas. System sewa sebagai institusi awal menjadi tergoyah, dan akhirnya runtuh sama sekali dalam tahun 1910-an. System yang awalnya di bangun pada awal abad ke 19 an ini akhirnya runtuh, system ini dibangun ketika Daendels secara resmi melelangkan hak sewa pengolahan dan penjualan opium untuk daerah-daerah tertentu pada awal abad ke-19. Strukturalisasi system sewa pada usaha penangkapan ikan terjadi sejak awal abad ke-19 an, dan makin mapan setelah sektor penangkapan ini ditetapkan sebagai salah satu sumber pemasukan kas Negara.

System sewa tidak hanya diterapkan pada usaha penangkapan ikan saja, tetapi juga diterapkan pada usaha perikanan lainnya. Usaha perikanan lainnya seperti pada usaha pencarian tripang dan kerang mutiara. Berbeda dengan system sewa dibidang penangkapan ikan, yang dasar pelaksanaannya adalah penarikan pajak untuk sektor penangkapan ikan, system sewa yang diterapkan untuk pencarian kerang mutiara dan tripang adalah system sewa atas hak eksploitasi daerah. Para penyewa mendapatkan hak untuk mengeksploitasi pencarian tripang atau kerang mutiara dalam waktu dan tempat-tempat yang ditetapkan.

Transaksi sewa-menyewa dilakukan melalui lelang terbuka oleh pemerintah Hindia-Belanda. Pelelangan semacam ini biasanya dilakukan pemerintahan tingkat Residensi, di pendopo kabupaten di pusat karesidenan. Ditempat ini berkumpul orang-orang terkemuka dari karesidenan, seperti bupati dan pejabat-pejabat bawahannya, pejabat Cina, dan sejumlah pejabat pemerintahan Belanda. Tugas residen sendiri sebagai wakil pemerintah yang bertugas sebagai pemimpin pelelangan resmi yang diadakan. Setiap orang pada dasarnya dapat mengikuti lelang ini, sebagaimana telah ditetapkan dalam *Staatsblad* tahun 1849, no. 52. Namun pada kenyataannya pelelangan semacam ini didominasi oleh orang-orang Cina.

Usaha yang harus dicapai untuk memenangkan lelang, seorang peserta biasanya memerlukan rekomendasi dari pihak penguasa. Penguasa yang dapat memperlancar pemenangan lelang bisa dari penguasa setempat atau pejabat pemerintahan Belanda. Tawaran yang diajukan kepada penguasa berupa hasil jumlah pembayaran untuk mendapatkan hak melakukan penarikan pajak

¹³ H. Dick, 'A Fresh Approach to Southeast Asian History', dalam Masyhuri, *Menyisir Pantai Utara* (Yayasan Pustaka Nusantara), hlm 82

penjualan dan penangkapan ikan di suatu daerah tertentu selama waktu yang ditetapkan.

Luas wilayah yang ditetapkan dalam transaksi sewa menyewa sering juga meliputi seluruh residensi, tetapi pada umumnya meliputi daerah-daerah tertentu yang lebih sempit. Karesidenan Pasuruan misalnya sebagai satu kesatuan wilayah penangkapan ikan disewakan secara keseluruhan kepada seorang pachter. Pelelangan ini dilakukan di Surabaya, yang biasanya dilakukan bersama-sama dengan pelelangan sektor lain, seperti pelelangan atas penyembelihan sapi, kerbau, babi, pelelangan penjualan arak dan minuman keras lainnya, penarikan pajak di pasar, pajak warung, dan sebagainya.

Hak-hak yang didapatkan seorang pemenang lelang berupa wewenang melakukan penarikan pajak dari penjualan dan penangkapan ikan, selain itu penyewa juga mendapatkan lisensi untuk berdagang ikan, dan memperoleh hak istimewa pembelian garam pemerintah untuk pengawetan ikan dengan harga yang lebih murah. Besaran pajak yang dibebankan kepada nelayan menurut ketentuan pemerintah sebesar 1/10 dari hasil tangkapan.¹⁴ Para nelayan mendapat kebebasan membayar pajak dengan uang atau dalam bentuk barang. Pada umumnya para nelayan kurang suka memasarkan sendiri hasil tangkapannya kepada para konsumen dengan resiko ikan menjadi busuk. Para nelayan lebih suka membayar pajak dalam bentuk ikan dan menjual ikan sisanya kepada pachter. Jual beli yang terjadi semacam ini tentu saja mempunyai konsekuensi tersendiri, misalnya harga menjadi lebih rendah dari harga sebenarnya.¹⁵ Bagi para nelayan tidak ada pilihan lain, dalam system sewa ini, mereka mau tidak mau harus berhubungan atau terikat pada pachter. Memberikan sebagian hasil tangkapan mereka untuk membayar pajak adalah pilihan yang paling menguntungkan bagi para nelayan.

Tidak diketahui secara pasti berapa pendapatan pemerintah Hindia-Belanda dari hasil uang sewa sektor penangkapan ikan. Data-data yang ditemukan hanyalah beberapa catatan tentang jumlah uang sewa saja. Jumlah uang sewa di Pasuruan dan Besuki pada akhir abad 19 hingga awal abad 20 mencapai kisaran f 24.180, f 30.000, f 143.762 dan meningkat seterusnya hingga mencapai dua kali lipat dari range terakhir.¹⁶

Sementara itu, peran para pachter sendiri menjadi semakin penting. System sewa dan perdagangan ini membawa para pachter ke dalam

bisnis perdagangan ikan yang lebih luas. Bagi para nelayan sendiri, system sewa bagaikan institusi keuangan. Para pachter telah menjadialah satu alternatif sumber modal usaha, disamping modal yang didapat dari system patungan yang telah mentradisi di kalangan nelayan pesisir. Tampaknya system sewa ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan usaha penangkapan ikan.

Seorang pachter dalam melakukan perannya dapat juga menyewakan daerah wewenangnya atau sebagian darinya kepada sejumlah pachter lainnya. Terkadang mereka para pachter turunan ini juga menyewakannya kembali bagian-bagian yang lebih kecil kepada pachter yang lainnya, system sewanya dapat berupa angsuran bulanan atau tahunan. Hal tersebut dilakukan para pachter untuk mempermudah pengawasan. Satuan wilayah penyewaan untuk penarikan pajak atas usaha penangkapan ikan yang tidak seragam yang dilakukan pemerintah Hindia-Belanda juga menjadi salah satu factor perpindahan tangan atau pengalihan sewa para pachter. Semakin sempit wilayah penyewaan, maka semakin kecil pula kemungkinan wilayah tersebut disewakan kembali kepada para sub penyewa. Tempat tertentu sebagai tempat pendaratan ikan juga menjadi salah satu factor munculnya sub sewa yang baru. Sementara untuk melakukan pengawasan pachter atau pembantunya tinggal mengunjungi tempat-tempat pendaratan ikan itu pada waktu-waktu tertentu saat musim pendaratan perahu.

Seorang pachter biasanya mengoperasikan sejumlah kantor penarikan pajak di wilayah-wilayah yang mereka sewa. Biasanya tempat-tempat tersebut dibangun di desa-desa nelayan atau di tempat-tempat pendaratan ikan. Mereka para pachter juga memperkerjakan sejumlah pegawai bawahan, di antaranya memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap nelayan-nelayan yang nakal, yang tidak mau membawa hasil tangkapannya ke kantor-kantor penarikan pajak yang ada.¹⁷ Struktur organisasi hubungan kerja dari institusi ini tampak berbentuk parallel. Meski pachter menempati posisi puncak, namun hubungan dengan bawahannya tidak terjadi secara ketat dalam bagian-bagian yang tersusun secara hirarkis. Sejumlah pekerja yang dipekerjakan di berbagai kantor penarikan pajak mempunyai hubungan garis lurus yang langsung terhubung kepada pachter. Antara puncak kekuasaan dan lapisan paling bawah sering terlihat tanpa perantara. Ada beberapa pachter yang memiliki perantara dalam menjalankan tugasnya, perantaranya biasanya bervariasi. Mereka para pesuruh pachter sebagai kesatuan digerakkan oleh system kekuasaan pachter.

¹⁴ ARA, Verbaal 5 Juli 1862, no. 21, passim, dalam Masyhuri, *Menyisir Pantai Utara* (Yayasan Pustaka Nusantara), hlm 87

¹⁵ Ibid

¹⁶ 'De Zeevisscherij...', *Het Nederlandsche Zeewezen*, 1905, hlm. 87; 'De Belasting...', 1861, hlm. 173-177; dalam Masyhuri, *Menyisir Pantai Utara* (Yayasan Pustaka Nusantara), hlm 88

¹⁷ ARA, Verbaal 5 Juli 1862, no. 21, passim, dalam Masyhuri, *Menyisir Pantai Utara* (Yayasan Pustaka Nusantara), hlm 89.

System kekuasaan itu muncul dikarenakan faktor kekayaan, serta kondisi yang membuat efektifitas operasional fungsi dari masing-masing pesuruh, serta hubungan personal antara individu yang aktif dalam organisasi.

PENUTUP

Kehidupan masyarakat Pasuruan yang memiliki pola hunian memanjang mengikuti bibir pantai serta jalan raya pantura (Anyer-Panarukan) banyak didominasi oleh orang-orang pendatang. Masyarakat nelayan memiliki klaster hunian di sepanjang bibir pantai Pasuruan, meliputi Bangil, Pasuruan, dan Grati. Kolonialisasi juga sangat mendominasi di pesisir Pasuruan, karena letak Pasuruan yang strategis, dekat dengan karesidenan Surabaya dan Besuki, yang menjadi kota tersibuk sebagai jalur militer dan jalur perdagangan. Pasuruan juga di dominasi oleh orang-orang tionghoa dan Arab. Bandar-bandar perdagangan ikan atau tempat pelelangan ikan yang seharusnya dikelola mandiri oleh masyarakat nelayan pesisir Pasuruan harus di miliki dan di kelola oleh pachter yang merupakan orang-orang pendatang dari Cina, karena mereka dapat memenangkan tander dengan pemerintah Hindia-Belanda.

Keuntungan atau pendapatan yang diperoleh nelayan tidak bisa diperbandingkan dengan pendapatan pachter/penadah. Pendapatan kotor seorang nelayan dalam satu tahun sekitar f 180,-. Jumlah pendapatan ini didasarkan pada perhitungan sebagai berikut ; jumlah pendapatan ikan per tahun di bagi jumlah penduduk dan di kurangi pajak yang dibebankan kepada nelayan. Besaran pajak yang dibebankan kepada nelayan adalah f 1,-, sementara untuk memberi balasan kepada pemilik modal nelayan di kenakan beban biaya sebesar 50% dari pendapatan kotor, 1/6 hasilnya lagi untuk angsuran perahu. Jadi seorang nelayan mendapatkan penghasilan bersih sebesar f 60,- per tahun atau sebesar f 5,- per bulan. Jumlah pendapatan ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan seorang nelayan menurut perhitungan *Mindere Welvaart Commissie*, yang setiap tahunnya bervariasi antara f 6,60 dan f 7,50 untuk nelayan yang berkerja pada perahu mayang yang di operasikan oleh 20 nelayan dan sebesar f 7,50 untuk nelayan yang berkerja pada perahu mayang yang di operasikan oleh 30 nelayan. Apabila dibuat rata-rata pendapatan seorang nelayan f 76,80 per tahun, atau f 6,40 per bulan, maka dari itu pendapatan seorang nelayan setiap harinya sekitar 21,30 sen.

Masyarakat asli nelayan Pasuruan tidak memiliki tempat yang layak hanya karena penggolongan kelas sosial yang muncul karena status perekonomian saja. Terjeratnya para nelayan pada monopoli perdagangan

juga sangat menyengsarakan kehidupan mereka. Penggolongan kelas sosial masyarakat nelayan yang dibuat oleh para kolonial menjadikan mereka terpecah-pecah dan mudah untuk di perbudak dan di adu domba. Penulis belum menemukan catatan mengenai catatan kekerasan atau tindakan kriminalitas yang terjadi di pesisir Pasuruan, akan tetapi dengan sistem organisasi seperti itu dan dengan kondisi sistem pembagian perekonomian yang tidak merata akan memunculkan berbagai konflik dan tindakan kriminalitas.

Penghasilan nelayan di wilayah Pasuruan sebenarnya tergolong tinggi, akan tetapi dengan pemotongan sistem sewa dan juga pembagian hasil atas perolehan ikan menjadikan uang atau hasil tangkapan yang diperoleh perseorangan menjadi sedikit. Konsep yang kaya semakin kaya juga sangat tercermin pada kehidupan nelayan pesisir Pasuruan, karena pandega atau juragan yang juga ikut melaut akan mendapatkan hasil dua kali lipat, bahkan terkadang tiga kali lipat dari seorang nelayan biasa. Keterbatasan armada yang dimiliki oleh masyarakat nelayan Pasuruan menjadikan sistem pembagian perekonomian tidak merata. Sistem hirarki kekuasaan juga tergambar jelas pada kehidupan sosial nelayan Pasuruan.

Masyarakat nelayan di daerah lain mungkin memiliki masalah yang sama seperti masyarakat nelayan Pasuruan, tetapi masyarakat pesisir Pasuruan memiliki masalah yang lebih beragam karena berdekatan sekaligus sebagai karesidenan penopang Surabaya dan Besuki. Pendapatan ikan yang lumayan besar juga sebagian besar di peroleh dari pesisir Pasuruan. Nelayan Pasuruan yang memiliki karakteristik nelayan kelompok kecil dan jangkauan tangkapan yang sempit karna hanya memiliki wilayah pelayaran di sekitar selat Madura saja, menjadikan masyarakatnya mudah untuk di atur. Cakupan wilayah tangkapan yang sempit juga memudahkan masyarakatnya untuk tetap berhuni di sekitaran garis pantai Pasuruan saja. Pola pemukiman yang memanjang di sekitaran bibir pantai untuk mendekati lahan pencarian juga mempengaruhi demografi hunian di Pasuruan yang memanjang di sekitar bibir pantai dan jalan Anyer-Panarukan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Hasil dan harga penjualan lauk pauk per tahun di karesidenan Pasuruan 1903,1904, 1905. "Abarktprijzen der ondervalojende artikelen" Peta karesidenan Pasuruan, "Stand van het landrente opnemingswerk in de residentien Pasoeroean en Besoeki", *Bladwijzer der herziene detailbladen van de residentie Pasoeroean*.

Buku

- A, Rilus Kinseng. *Konflik Nelayan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Asnan, Gusti. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2007.
- Kasdi, Aminudin. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press, 2011.
- Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta : Matabangsa, 2002.
- Masyhuri. *Menyisir Pantai Utara*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 1996.
- R, Ian Smith dan Ferial Marahuddin. *Ekonomi Perikanan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.

Jurnal

- Abd. Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti.2016.*Determinan Pendapatan Nelayan Tangkap Tradisional Wilayah Pesisir Barat Kabupaten Barru*. Jurnal Sosial Ekonomi. Hal 75-88. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021.
- Endang Retnowati.2011.*Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural*.Jurnal *Prespektif*. Hal 149-159. Diakses pada 2 Desember 2021.
- Singgih Tri Sulistiyono.2014.*Mengenal Sistem Pengetahuan, Teknologi, dan Ekonomi Nelayan Pantai Utara Jawa*. Jurnal Agastya. Hal 15-35. Diakses pada tanggal 6 juni 2018.
- Siti Malikhah dan Sukaryanto.2019.*Modernisasi Transportasi Di Pasuruan 1895-1929*.Jurnal *Kesejarahan*. Hal 284-295. Diakses pada tanggal 14 juli 2020.
- Sutejo K. Widodo.2011.*Dinamika Kebijakan Tentang Perikanan dan Transformasi Budaya Nelayan Pantai Utara Jawa*. Jurnal *Sabda*. Hal 3-15. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018.
- Suwaib Amiruddin.2014.*Jaringan Sosial Pemasaran Pada Komunitas Nelayan Tradisional Banten*. Jurnal *Komunitas*. Hal 106-115. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021.
- Wilson M.A. Therik.2008.*Nelayan Dalam Bayangan Juragan Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Bajo di Tanjung Pasir, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur*. Jurnal *Ukim*. Hal 28-46. Diakses pada tanggal 17 Desember 2021.